



Bappeda
Provinsi Papua

PEMETAAN LAPANGAN USAHA UNGGULAN & POTENSI INVESTASI

DI PROVINSI PAPUA
PADA ERA PANDEMI COVID-19



PUSDALISBANG
BAPPEDA PROVINSI PAPUA



bappeda.papua.go.id



[bappedapapua](https://www.instagram.com/bappedapapua)



[Bappeda Provinsi Papua](https://www.youtube.com/BappedaProvinsiPapua)

**Pemetaan Lapangan Usaha
Unggulan & Potensi Investasi
Di Provinsi Papua
Pada Era Pandemi Covid-19**

TIM PENYUSUN

Andry, S.IP., M.Si

DR. Bintang Yuliana, SE., MM

Ir. Iriawan, MBA., MM

Yune N. Jonathan, SE

Novita H. Mra-mra, SE

Elisabeth Lumingkewas

Mikha Bukorpioper

Indra Rukmana, S.Kom

Novi Agaki, SE

Saiful Musaad

KATA PENGANTAR

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini berdampak pada perekonomian global maupun perekonomian nasional dan tentunya berdampak pula pada perekonomian Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya untuk meminimalisir dampak dari pandemi Covid-19 terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi maupun komponen perekonomian, baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi lapangan usaha.

Kajian Pemetaan Lapangan Usaha Unggulan dan Potensi Investasi di Provinsi Papua Pada Era Pandemi Covid-19 menyajikan metodologi, penghitungan, dan analisis terkait pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua dari sisi pengeluaran dan juga dari sisi lapangan usaha sehingga dapat memetakan lapangan usaha unggulan dengan tingkat potensi investasi yang tinggi pada era pandemi Covid-19 ini.

Kajian ini dapat diselesaikan berkat kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak sehingga tidak lupa diucapkan terimakasih. Selain itu, kajian ini tentunya tidak lepas dari kekurangan sehingga dibutuhkan saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Jayapura, November 2021

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Papua

YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Abstrak	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	5
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Kondisi Umum Provinsi Papua	6
B. Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Provinsi Papua	10
C. Kondisi Perekonomian Provinsi Papua di Era Pandemi Covid-19	13
BAB III LANDASAN KAJIAN	
A. Pembangunan Ekonomi Daerah	17
B. Pertumbuhan Ekonomi	17
C. Konsep Basis Ekonomi	19
D. Teori Perubahan Struktural	19
E. Investasi	20
F. <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)	20
BAB IV METODE	
A. Metode Pengumpulan Data	23
B. Metode Analisis Data	23
BAB V PEMBAHASAN	
A. Klasifikasi Lapangan Usaha Unggulan Provinsi Papua	29
B. Analisis Lapangan Usaha Unggulan	32
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	43
B. Rekomendasi	44
Daftar Pustaka	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2020	7
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019-2020	14
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2019-2020	15
Tabel 4.1	Klasifikasi Sektor Berdasarkan Tipologi Klasen	26
Tabel 4.2	Penentuan Skor Berdasarkan Metode TPI	27
Tabel 5.1	Indikator Makro Pembangunan Indonesia dan Provinsi Papua Tahun 2019-2020	28
Tabel 5.2	Kontribusi PDRB Provinsi Papua Tahun 2015-2020	29
Tabel 5.3	Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Papua Tahun 2015-2020	30
Tabel 5.4	Analisis LQ Provinsi Papua Tahun 2019-2020	31
Tabel 5.5	Analisis MRP Provinsi Papua Tahun 2019-2020	33
Tabel 5.6	Analisis <i>Overlay</i> Provinsi Papua Tahun 2019-2020	35
Tabel 5.7	Analisis <i>Shift Share</i> Provinsi Papua Tahun 2019-2020	36
Tabel 5.8	Analisis Tipologi Klassen Provinsi Papua Tahun 2019-2020	38
Tabel 5.9	Hasil Perhitungan Potensi Investasi	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2015-2020	4
Gambar 2.1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua	8
Gambar 2.2	Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2020	9
Gambar 5.1	Pemetaan Kuadran menurut Tipologi Klassen	39

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini berdampak pada ketidakpastian perekonomian global yang tergambar pada terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini tentunya berdampak pula pada perekonomian Provinsi Papua. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis lapangan usaha unggulan dan potensi investasi di Provinsi Papua pada era pandemi Covid-19. Adapun lapangan usaha yang tersebut, sebagai berikut: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Real Estate; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pengadaan Listrik dan Gas; Jasa Pendidikan; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi Jasa Perusahaan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Location Quotient (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Overlay, Shift Share, Tipologi Klassen serta Analisis Tingkat Potensi Investasi (TPI). Data yang digunakan dalam penelitian adalah data PDRB Provinsi Papua dan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha dengan periode tahun 2019 hingga 2020 serta beberapa data pendukung lainnya yang dirasa penting untuk mendukung penyusunan kajian ini. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa (i) Terdapat 4 (empat) lapangan usaha yang masuk dalam kategori sektor basis, yaitu, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian; (ii) Terdapat 3 (tiga) lapangan usaha unggulan ditinjau dari tingkat pertumbuhannya, yaitu Pertambangan dan Penggalian; Informasi dan Komunikasi; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (iii) Terdapat 2 (dua) lapangan usaha unggulan, yaitu Pertambangan dan Penggalian serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (iv) Terdapat 1 (satu) lapangan usaha yang unggul dalam daya saingnya, yaitu Pertambangan dan Penggalian; (v) Terdapat 2 (dua) lapangan usaha yang memiliki tingkat pengembangan tinggi yaitu Pengadaan Listrik dan Gas serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Terdapat 2 (dua) lapangan usaha yang memiliki klasifikasi tingkat potensi investasi tinggi, yaitu Pertambangan dan Penggalian serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan perekonomian suatu negara menuju kepada kondisi yang lebih baik dan proses tersebut berlangsung secara berkesinambungan. Kegiatan ekonomi masyarakat dari suatu negara yang memiliki dampak langsung pada kenaikan produksi barang dan jasa merupakan salah satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi. Dalam lingkup yang lebih kecil, pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah karena akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Apridar, dkk., 2019).

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini berdampak pada perekonomian global yang mengalami ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan dan hal ini tentunya juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi 2,07 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 5,02 persen. Apabila ditinjau dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan kelompok pulau, maka hanya pulau Sulawesi, Maluku dan Papua yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Untuk Pulau Sulawesi sebesar 0,23 persen serta Pulau Maluku dan Pulau Papua sebesar 1,44 persen. Sedangkan Pulau Sumatera (-1,19 persen), Pulau Jawa (-2,51 persen), Pulau Kalimantan (-2,27 persen), serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara (-5,01 persen) mengalami pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif (BPS, 2021).

Untuk sisi produksi, terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu industri pengolahan sebesar -2,93 persen, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor sebesar -3,72, konstruksi sebesar -3,26 persen, pertambangan dan penggalian sebesar -1,95 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -10,22 persen, jasa perusahaan sebesar -5,44 persen, jasa lainnya sebesar -4,10 persen, dan transportasi dan pergudangan sebesar -15,04 persen. Dengan demikian dapat dilihat bahwa jasa transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan terdalam untuk sisi produksi. Namun, terdapat juga beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu pertanian,

kehutanan, dan perikanan sebesar 1,75 persen, informasi dan komunikasi sebesar 10,58 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,60 persen, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 4,94 persen, dan real estate sebesar 2,32 persen, Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial (BPS, 2021).

Dari sisi pengeluaran pun terdapat beberapa komponen yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar -2,63 persen, pengeluaran konsumsi lembaga *nonprofit* yang melayani rumah tangga (LNPRRT) sebesar -4,29 persen, pembentukan modal tetap bruto sebesar -4,95 persen, ekspor barang dan jasa sebesar -7,70 persen, serta impor barang dan jasa sebesar -14,71 persen. Dengan demikian dapat terlihat bahwa komponen impor barang dan jasa mengalami pertumbuhan terdalam. Sementara itu, komponen yang mengalami pertumbuhan positif adalah pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 1,94 persen (BPS, 2021).

Sutrisno (2019) dalam kajian “Covid-19 dan Arah Ekonomi Indonesia” mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum dimulainya transformasi perubahan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi dengan lebih mengutamakan pada produk dalam negeri. Sementara itu, salah satu penelitian terkait dampak dari pandemi Covid -19 terhadap perekonomian suatu daerah dilakukan oleh Hardiansyah, dkk (2021) yang melakukan penelitian tentang Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Kepulauan Riau. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akibat dari pandemi Covid-19 adalah terjadi perlambatan perekonomian global dan nasional yang juga berdampak pada perekonomian Kepulauan Riau yang mengalami kontraksi, baik dari pertumbuhan ekonomi maupun komponen perekonomian (sisi pengeluaran dan sisi lapangan usaha). Selain itu juga menyebabkan pergerakan laju inflasi berjalan tidak seperti biasa.

Penelitian lainnya terkait pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perekonomian juga dilakukan oleh Oeliesta (2021). Adapun penelitian tersebut dilakukan di Provinsi Jambi dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Jambi, baik pertumbuhan *y on y, q to q*, maupun *c to c*. selain itu, terdapat 9 (sembilan) sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19, yaitu transportasi, penyediaan akomodasi, jasa perusahaan, jasa lainnya, konstruksi, real estate, administrasi pemerintahan, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar dan eceran. Sektor yang paling terdampak

pada tahun 2020 hingga berkontraksi laju pertumbuhannya adalah transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan, serta jasa lainnya.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan usaha baru dan menstimulus perekonomian di daerah. Terdapat 4 (empat) dimensi utama dalam pembangunan ekonomi, yaitu pertumbuhan, penanggulangan kemiskinan, perubahan atau transformasi ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri (Todaro, 1999). Indikator yang umum digunakan dalam mengukur keberhasilan kinerja pembangunan ekonomi, salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator lainnya yang juga dapat digunakan adalah tingkat pertumbuhan, PDRB perkapita dan pergeseran atau perubahan struktur ekonomi (Sjafrizal, 2008).

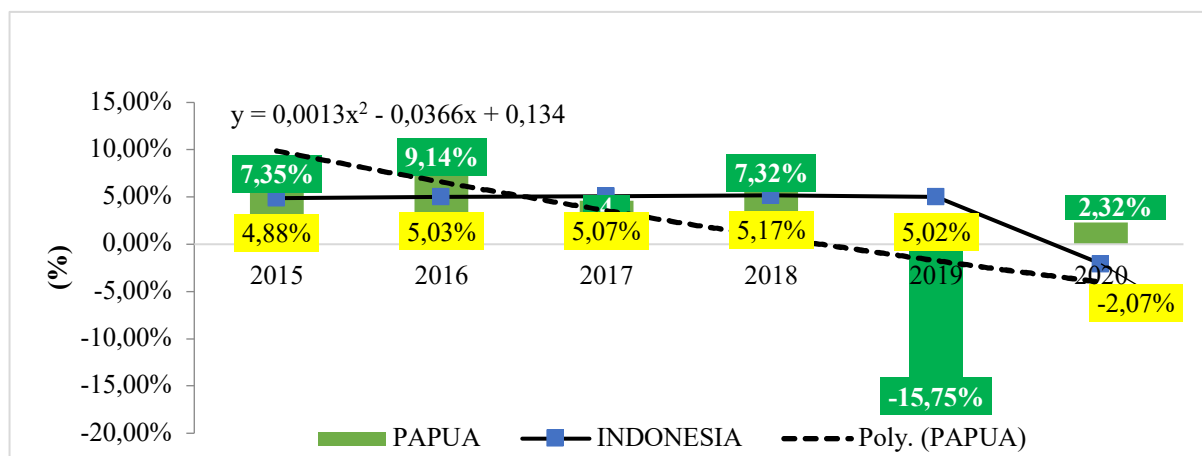
Pembangunan ekonomi daerah dapat dioptimalkan dengan fokus pada sektor ekonomi yang meningkatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara signifikan. Pemetaan sektor ekonomi dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu basis dan non basis. Sektor basis merupakan sektor yang mampu mengekspor barang dan jasa ke luar daerah. Sedangkan sektor non basis adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Sektor non basis tidak mengekspor barang jadi dan ruang lingkupnya masih bersifat lokal (Glasson, 1990). Apabila dikembangkan secara tepat maka sektor basis dapat berkontribusi paling besar terhadap perekonomian suatu daerah.

Provinsi Papua tentunya juga terkena dampak dari pandemi Covid-19. Untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus Covid-19 maka Pemerintah Provinsi Papua memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang ternyata juga berdampak pada kinerja perekonomian daerah. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2020 masih mampu bertahan di angka 2,32 persen. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2019 yang mengalami kontraksi sebesar -15,75 persen (BPS, 2021). Peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 disebabkan karena terjadinya pertumbuhan dari sisi produksi maupun dari sisi pengeluaran. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang berperan sebagai kontributor terbesar pada perekonomian Provinsi Papua mengalami peningkatan sebagai akibat dari terjadinya peningkatan produksi bijih logam dari PT. Freeport Indonesia. Selain

dari sisi produksi, terjadi pula peningkatan pada sisi pengeluaran berupa peningkatan pertumbuhan tertinggi pada komponen ekspor barang jasa. Namun, masih terdapat beberapa lapangan usaha dan komponen pengeluaran yang mengalami kontraksi pertumbuhan karena tidak dapat tumbuh sesuai kapasitasnya pada masa pandemi Covid-19 ini. Apabila ditinjau tanpa tambang maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2020 sebesar -3,51 persen dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tanpa tambang tahun 2019 yang sebesar 4,98 persen.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua berada di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 trennya memiliki kecenderungan menurun. Terdapat beberapa kejadian tertentu yang menjadi catatan, seperti halnya di tahun 2019 ketika pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua turun drastis menjadi -15,75% karena disebabkan oleh turunnya produksi bijih logam PT. Freeport Indonesia sehingga lapangan usaha pertambangan dan penggalan sebagai kontributor utama perekonomian Papua mengalami perlambatan.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2015 - 2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, data diolah.

Tahun 2020 menjadi catatan selanjutnya, pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua mampu bertahan di angka 2,32%, sedangkan pertumbuhan ekonomi skala nasional mengalami pertumbuhan yang negatif. Hanya Provinsi Papua, Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah yang mampu tumbuh positif di tengah pandemi Covid-19. Dari beberapa fenomena tersebut terindikasi bahwa terdapat

potensi pergeseran struktur ekonomi di Provinsi Papua sehingga dibutuhkan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu akan dilakukan kajian dengan judul **“Pemetaan Lapangan Usaha Unggulan Dan Potensi Investasi di Provinsi Papua Pada Era Pandemi Covid-19”**.

B. TUJUAN

Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk memetakan lapangan usaha yang unggul di Provinsi Papua dari sisi kontribusi, pertumbuhan, daya saing, tingkat pengembangan, dan potensi investasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah di era pandemi Covid-19.

BAB II GAMBARAN UMUM

A. KONDISI UMUM PROVINSI PAPUA

1. Geografis

Provinsi Papua secara geografis terletak antara 2^o25' – 9^o0' Lintang Selatan dan antara 130^o0' – 141^o0' Bujur Timur serta memiliki luas wilayah sebesar 32.027.839 hektar. Provinsi Papua berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara : Samudera Pasifik
- b. Sebelah selatan : Laut Arafuru
- c. Sebelah barat : Provinsi Papua Barat
- d. Sebelah timur : Negara Papua Nugini

Wilayah administratif Provinsi Papua terdiri dari 28 Kabupaten dan 1 Kota, yang terbagi menjadi 470 Distrik dan 4.378 Kampung. Kabupaten dengan luas wilayah terbesar adalah Merauke, seluas 46.430,54 km². Sedangkan Kabupaten dengan luas wilayah paling kecil adalah Supiori, seluas 691,67 km² (Provinsi Papua Dalam Angka 2021).

Terdapat 19 (sembilan belas) Kabupaten di wilayah Provinsi Papua yang berada di daerah dataran sulit akses dan pegunungan. Dari 5.549 kampung yang teridentifikasi melalui data statistik tahun 2021, sebanyak 4.349 kampung terletak di daerah pegunungan dan sulit akses. Kurang lebih 80% dari seluruh kampung tersebut masih merupakan daerah yang terisolasi dari akses transportasi. Keragaman kondisi geografi wilayah Kabupaten/Kota yang tidak seimbang, baik dilihat dari luas maupun letak wilayahnya, menjadi salah satu kendala bagi Pemerintah Provinsi Papua selama ini dalam memberi pelayanan publik ke seluruh pelosok kampung secara optimal.

Tabel 2.1
Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2020

Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km2)*	Ibu Kota	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan	Keterangan
Anim Ha	Merauke	47.406,90	Merauke	20	190	14	Dataran Mudah Akses
	Asmat	24.687,57	Agats	23	221	4	Dataran Sulit Akses
	Boven Digoel	24.665,98	Tanah Merah	20	111	5	
	Mappi	23.178,45	Keppi	15	164	2	
La Pago	Jayawijaya	2.331,19	Wamena	40	331	15	Pegunungan Tengah
	Lanny Jaya	3.439,79	Tiom	39	356	-	
	Mamberamo Tengah	3.384,14	Kobakma	5	59	-	
	Nduga	5.381,47	Kenyam	32	248	-	
	Pegunungan Bintang	14.655,36	Oksibil	34	277	-	
	Puncak	5.618,84	Ilaga	25	206	-	
	Puncak Jaya	2.446,50	Mulia	26	302	-	
	Tolikara	6.149,67	Karubaga	46	545	-	
	Yahukimo	15.057,90	Dekai	51	518	1	
Yalimo	3.658,76	Elelim	5	300	-		
Mee Pago	Nabire	4.549,75	Nabire	15	89	9	Dataran Mudah Akses
	Mimika	2.300,37	Timika	18	147	24	Dataran Sulit Akses
	Deiyai	2.325,88	Waghete	5	67	-	Pegunungan Tengah
	Dogiyai	4.522,15	Kigamani	10	79	-	
	Intan Jaya	9.336,60	Sugapa	8	97	-	
	Paniai	20.686,00	Enarotali	24	216	-	
Saireri	Biak Numfor	13.017,45	Biak	19	262	23	Dataran Mudah Akses
	Kepulauan Yapen	4.936,37	Serui	16	165	18	
	Supiori	634,24	Sorendiweri	5	38	1	Dataran Sulit Akses
	Waropen	5.381,47	Waren	12	117	1	
Mamta	Jayapura	14.390,16	Sentani	19	144	17	Dataran Mudah Akses
	Keerom	9.015,03	Arso	11	91	-	
	Sarmi	13.965,58	Sarmi	19	111	2	
	Mamberamo Raya	28.034,87	Burmeso	9	59	-	
	Kota Jayapura	950,38	Jayapura	5	39	23	Dataran Sulit Akses
	Total	316.552,6		576	5.549	159	

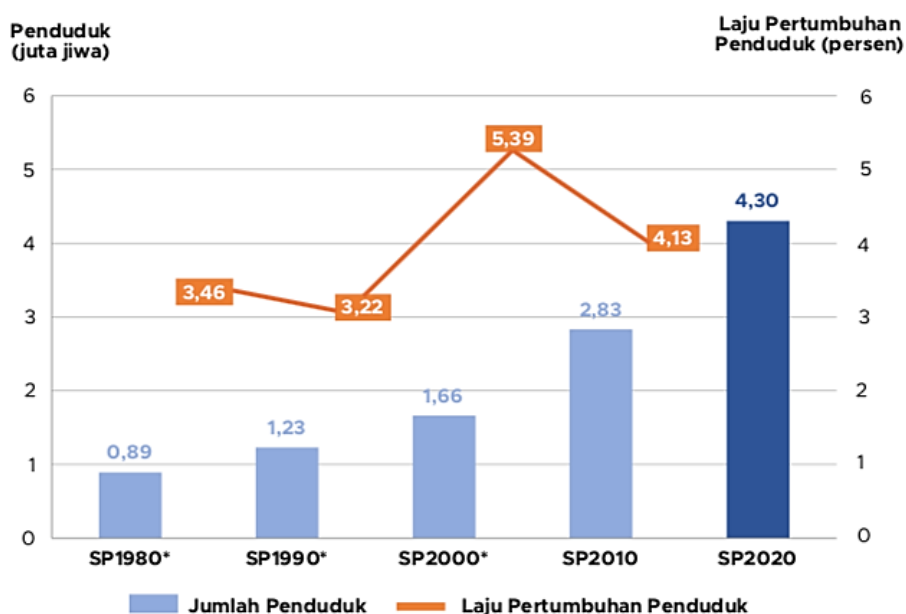
Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka 2021, data diolah.

2. Kependudukan

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 mencatat bahwa jumlah penduduk Provinsi Papua pada bulan September 2020 sebanyak 4.303.707 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebesar 53,32 persen dan penduduk perempuan 46,68 persen. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 2.294.811 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 2.008.891 jiwa. Sementara itu, rasio jenis kelamin sebesar 114,23. Ini berarti bahwa terdapat lebih kurang 114 orang penduduk laki-laki untuk setiap 100 orang penduduk perempuan (Provinsi Papua Dalam Angka 2021).

Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010 sampai tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Papua mengalami peningkatan sebesar 4,30 juta jiwa dan dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 4,27 persen. Terjadi perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar sebesar 1,12 persen jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2010 yang sebesar 5,39 persen (Provinsi Papua Dalam Angka 2021). Walau terjadi perlambatan, namun laju pertumbuhan penduduk Provinsi Papua sepanjang 2010-2020 masih lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sebesar 1,25 persen.

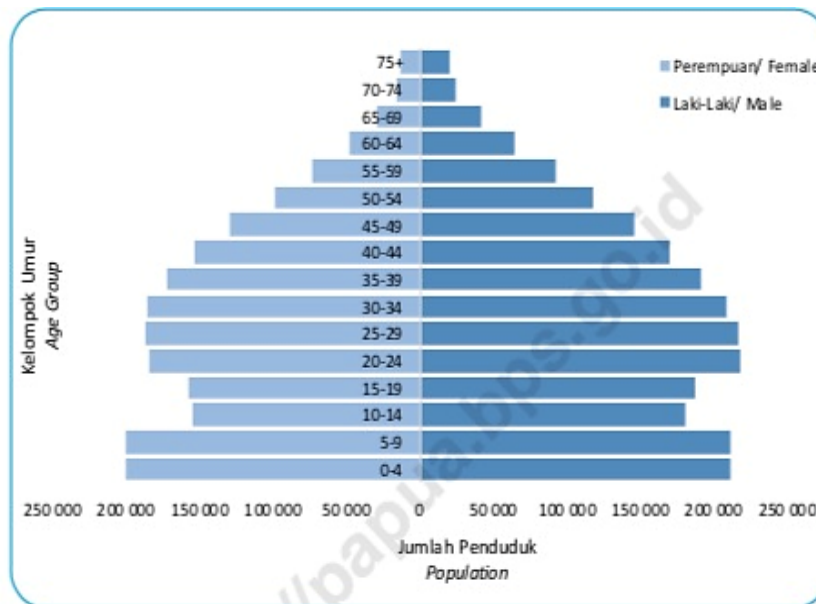
Gambar 2.1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua



Sumber: BPS Provinsi Papua, data diolah.

Berdasarkan bentuk piramida penduduk yang ekspansif mencirikan struktur penduduk di Provinsi Papua selama ini adalah struktur penduduk muda. Lihat Gambar 2.2 berikut ini.

Gambar 2.2
Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021.

Menurut komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur maka persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 55,97 persen dari total populasi dan meningkat hingga mencapai 69,73 persen di tahun 2020. Perbedaan antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia masih berada dalam masa bonus demografi dan tidak terkecuali di Provinsi Papua.

3. Kemiskinan

BPS Provinsi Papua melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua tahun 2019 sebesar 926,36 ribu jiwa dan tahun 2020 sebesar 911,37 ribu jiwa (Provinsi Papua Dalam Angka 2021). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi

penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 14,99 ribu jiwa pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. BPS Provinsi Papua juga melaporkan bahwa telah terjadi peningkatan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua sebesar 0,16 persen pada September 2020 dibandingkan Maret 2020. Jika pada Maret 2020 persentase penduduk miskin sebesar 26,64 persen maka pada September 2020 meningkat menjadi sebesar 26,80 persen (Berita resmi statistik Provinsi Papua, 15 Februari 2021).

4. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2020, penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas) di Provinsi Papua tahun 2020 sebesar 2,45 juta jiwa. Untuk angkatan kerja, terdapat sebesar 1,77 juta jiwa (72,16 persen) dan didominasi oleh penduduk laki-laki yang sebesar 1,04 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk bekerja adalah sebesar 1,69 juta jiwa dan juga didominasi oleh penduduk laki-laki sebesar 58,44 persen. Sebesar 1,13 juta jiwa penduduk bekerja di Provinsi Papua mendominasi di sektor pertanian dan sisanya sebesar 0,56 juta jiwa bekerja di sektor lainnya. Dominasi penduduk bekerja di sektor pertanian ini berkaitan dengan tingkat pendidikan tertinggi dominan pada level pendidikan sekolah dasar atau dibawahnya sebesar 0,95 juta jiwa (Provinsi Papua Dalam Angka 2021).

B. KONDISI PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA DAN PROVINSI PAPUA

1. Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia

Kasus Covid-19 pertama di Indonesia ditemukan pada 2 Maret 2020 dan pada 13 Maret 2020 dibentuk Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 oleh Presiden Republik Indonesia. Kemudian, Indonesia dalam kedaruratan kesehatan masyarakat pandemi Covid-19 ditetapkan pada 31 Maret 2020 oleh Presiden Republik Indonesia.

Guna mencegah penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial sehingga mengakibatkan terjadinya pembatasan terhadap aktivitas masyarakat.

Secara kumulatif, per 29 September 2021, total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 4,2 juta kasus. Pasien sembuh sebanyak 4 juta orang dan

pasien meninggal sebanyak 141,8 ribu orang dan kasus aktif sebanyak 37,4 ribu orang (Kementerian Kesehatan).

Target sasaran vaksin adalah 208,2 juta. Sementara itu, total capaian vaksinasi kesatu sebesar 89,8 juta, vaksinasi kedua sebesar 50,4 juta, dan vaksinasi ketiga sebesar 924,8 ribu sehingga akumulasinya sebesar 141,1 juta.

Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan terjadinya penurunan ekonomi dan membawa dampak buruk pada berbagai aspek di Indonesia. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan ekonomi untuk menekan dampak pandemi Covid-19. Untuk tahun 2021, strategi pemulihan ekonomi tetap dilanjutkan agar perekonomian nasional dapat segera pulih kembali. Pemerintah berusaha berperan aktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran.

Berbagai dampak dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia saat ini terutama dalam hal kesulitan mencari lapangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena tidak mempunyai penghasilan tetap Hoanotubun (2020). Hal ini tentunya terkait dengan ketenagakerjaan. Sebagaimana terlihat dari hasil Survey Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan pada Agustus 2020 oleh Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19 sebesar 14,28 persen. Terdapat sekitar 2.562.530 orang (1,26 persen) menjadi pengangguran karena pandemi Covid-19. Sebesar 757.574 orang (0,37 persen) keluar dari pasar kerja dan masuk menjadi BAK karena pandemi Covid-19. Sementara itu, sebesar 1.772.760 orang (0,87 persen) sementara tidak bekerja karena pandemi Covid-19 dan sebesar 24.027.576 orang (11,78 persen) yang mengalami pengurangan jam kerja karena pandemi Covid-19. Dengan demikian, terdapat sekitar 29.120.440 orang tenaga kerja terdampak pandemi Covid-19 (Ketenagakerjaan Dalam Data Edisi 3 Tahun 2021).

2. Kondisi Pandemi Covid-19 di Provinsi Papua

Jumlah kasus aktif di Provinsi Papua per 3 September 2021 mencapai 12.378 kasus atau meningkat 6,80% dibandingkan per 9 Agustus 2021 lalu. Kondisi ini menjadikan Provinsi Papua memiliki jumlah kasus aktif terbesar kedua di luar

Jawa Bali, di bawah Provinsi Sumatera Utara sebesar 19.422 kasus. Walau demikian, secara umum di tingkat nasional terjadi penurunan kasus aktif di daerah luar Jawa Bali, yaitu di wilayah Sumatera (-48,41%), Nusa Tenggara (-71,20%), Kalimantan (-60,25%), serta Maluku-Papua-Papua Barat (-29,26%).

Per 3 September 2021, di Provinsi Papua, jumlah kasus aktif kumulatif dari tahun lalu adalah 32.568 kasus (*share* nasional 0,79%), sedangkan kasus aktif seminggu terakhir adalah 12.378 kasus (38%). Kalau untuk persentase kumulatif dari awal pandemi sampai 3 September 2021, tingkat kesembuhan 19.832 kasus (60,9%), dan tingkat kematian 358 kasus (1,10%).

Positivity Rate yang masih cukup tinggi, terutama di Kabupaten Supiori (60,0%) dan Kabupaten Mamberamo Tengah (33,3%) menyebabkan masih harus ditingkatkan jumlah testing. Capaian testing yang cukup tinggi di hanya di Kabupaten Boven Digoel dan Kota Jayapura yang sudah mencapai lebih dari 80 persen.

Jika dilihat dari Zonasi Risiko, Provinsi Papua termasuk dalam Zonasi Risiko Sedang (Zona Oranye). Terdapat 15 Kabupaten/Kota dengan Risiko Rendah (Zona Hijau), 14 Kabupaten/Kota dengan Risiko Sedang (Zona Oranye). Sementara, BOR Provinsi Papua yaitu 36%, di atas BOR Nasional (22%). Sejumlah Kabupaten/Kota BOR masih berada di atas 50%, terutama di Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Mappi (100%), Kabupaten Mimika, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Jayawijaya (>50%).

Untuk capaian vaksinasi di Provinsi Papua, per 2 September 2021, vaksinasi pertama sebesar 18,03% (masih di bawah capaian nasional 31,32%). Untuk 5 Kabupaten/Kota yang terkait penyelenggaraan PON, minimal sudah harus mencapai 70 vaksinasi pertama sebelum PON dimulai dan vaksinasi kedua terus digalakkan. Melihat kondisi ini maka kerjasama pihak terkait, baik dari sisi dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi, sampai ke Kabupaten/Kota terus dijaga dan digalakkan guna mendorong penurunan jumlah kasus aktif menjelang penyelenggaraan PON XX di Papua, terutama 5 (lima) Kabupaten/Kota yang terkait langsung dengan penyelenggaraan PON, yaitu Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Keerom sebagai penyangga.

C. KONDISI PEREKONOMIAN PROVINSI PAPUA DI ERA PANDEMI COVID-19

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2019 sebesar -15,75 persen dan tahun 2020 sebesar 2,32 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2019 berada -13,43 persen dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 persen dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2020 berada 4,39 persen diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar -2,07 persen.

1. Dari Sisi Lapangan Usaha

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2019-2020

No.	Lapangan Usaha	2019 (%)	2020 (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03	-0,67
2	Pertambangan dan Penggalian	-43,27	16,62
3	Industri Pengolahan	-1,25	-5,02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,87	-0,96
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	-3,35	-2,88
6	Konstruksi	9,04	-0,85
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,35	-2,48
8	Transportasi dan Pergudangan	5,95	-33,63
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,40	-16,93
10	Informasi dan Komunikasi	7,32	3,72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,28	-1,47
12	Real Estate	6,10	-0,23
13	Jasa Perusahaan	6,75	-7,62
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,66	-0,19
15	Jasa Pendidikan	6,68	-0,64
16	Jasa Kesehatan dan Sosial Wajib	4,83	3,82
17	Jasa Lainnya	5,77	-3,21

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka 2021

Berdasarkan Tabel 2.2, maka dapat dilihat bahwa hanya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 26,65 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Jika pada tahun 2019 pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi sebesar -43,27 persen maka tahun 2020 pertumbuhannya sebesar

16,62 persen. Sedangkan 16 (enam belas) lapangan usaha lainnya (non tambang) mengalami penurunan dalam pertumbuhannya yang disebabkan karena penyebaran virus Covid 19 sehingga memberikan dampak negatif terhadap aktivitas perekonomian Provinsi Papua (Laporan Perekonomian Provinsi Papua, 2021). Walaupun demikian, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi serta Jasa Kesehatan dan Sosial Wajib masih mengalami pertumbuhan positif.

Lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam pada tahun 2020 adalah Transportasi dan Pergudangan. Salah satu penyebab terjadinya kontraksi tersebut adalah karena adanya kebijakan Pemerintah terkait pembatasan aktivitas pergerakan masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Sementara itu, lapangan usaha Kontruksi juga mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Peningkatan pertumbuhan lapangan usaha Kontruksi pada tahun 2019 disebabkan karena adanya pembangunan infrastruktur untuk PON XX Papua 2021.

2. Dari Sisi Pengeluaran

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Berdasarkan Pengeluaran
Tahun 2019-2020

No.	Lapangan Usaha	2019 (%)	2020 (%)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)	3,70	-5,58
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Pemerintah (PK-LNPRT)	15,85	-7,54
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP)	4,11	-0,06
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3,48	-1,50
5	Perubahan Inventori	-	-
6	Ekspor Luar Negeri	-68,90	51,18
7	Dikurangi Impor Luar Negeri	-30,23	-37,69
8	Net Ekspor Antar Daerah	-	-

Sumber: BPS Provinsi Papua

Berdasarkan Tabel 2.3, maka dapat dilihat bahwa hanya komponen Ekspor Luar Negeri yang mengalami pertumbuhan positif sedangkan 5 (lima) komponen pengeluaran lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan. Kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada komponen Impor sebesar -37,69 persen.

Kebijakan Pemerintah terkait pembatasan aktivitas masyarakat guna mencegah penyebaran virus Covid-19 berdampak pada aktivitas produksi yang nyaris terhenti dan juga terjadinya penurunan konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, kebijakan tersebut menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kontraksi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT). Selain itu, dampak dari kebijakan tersebut juga berpengaruh pada kontraksi pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Pemerintah (PK-LNPRT) tahun 2020.

Sementara itu, realokasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 berakibat pada terjadinya kontraksi pertumbuhan pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) pada tahun 2020. Selain itu, realokasi anggaran tersebut juga menyebabkan Pemerintah mengurangi belanja modal serta belanja barang dan jasa sehingga berpengaruh terhadap terjadinya kontraksi pertumbuhan dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Pertumbuhan komponen Ekspor Barang dan Jasa pada tahun 2020 sebesar 51,18 persen. Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami peningkatan sebesar 120,08 persen jika dibandingkan tahun 2019 yang mengalami kontraksi sebesar -68,90 persen. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan sebesar 258 persen pada ekspor konsentrat (HS26) di tahun 2020.

Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi tahun 2020 disebabkan oleh pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 16,62 persen dan dari sisi pengeluaran disebabkan oleh pertumbuhan komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 51,18 persen. Sementara itu, kontribusi terbesar dari sisi produksi berasal dari lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 28,27 persen dan dari sisi pengeluaran adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 50,79 persen (BPS, 2021).

Tingkat inflasi Provinsi Papua tahun 2019 sebesar 0,66 persen dan tahun 2020 sebesar 1,64 persen. Sedangkan tingkat inflasi nasional tahun 2019 sebesar 2,72 persen dan tahun 2020 sebesar 1,69 persen (Laporan Perekonomian Provinsi Papua, Februari 2021). Tingkat inflasi yang rendah (dibawah kisaran $3,01 \pm 1\%$) tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi Covid-19 sehingga permintaan domestik belum kuat, pasokan memadai, dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah, baik

di pusat maupun di daerah dalam menjaga kestabilan harga (Siaran Pers Bank Indonesia, Januari 2021).

Terkait ketenagakerjaan, BPS Provinsi Papua mencatat bahwa pada Agustus 2021 sebesar 45,51 persen usia kerja terdampak Covid-19. Sebanyak 8.796 orang sementara tidak bekerja karena Covid-19 dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebesar 159.551 orang. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan sepanjang Februari – Agustus 2021 lebih banyak karena untuk kebutuhan persiapan PON XX Papua 2021 dan Peparnas XVI Papua 2021. Selain itu, kelompok umur yang paling terdampak Covid-19 adalah kelompok umur 25-59 tahun (kelompok produktif).

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua tahun 2019 sebesar 3,65 persen dan meningkat sebesar 0,63 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 4,28 persen (Provinsi Papua Dalam Angka 2021). Ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan tenaga kerja yang ada di era masa pandemi Covid-19 (tahun 2020).

BAB III

LANDASAN KAJIAN

A. PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Pembangunan ekonomi daerah berkaitan dengan kolaborasi positif antara pemerintah daerah dengan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di daerah. Pembangunan ekonomi menurut Todaro dan Smith (2004) diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis yang lalu mengalami perubahan dalam kurun waktu yang cukup lama. Lebih lanjut, Arsyad (1999) menyatakan bahwa pada hakekatnya pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan pelaksanaan pembangunan nasional pada wilayah tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan fisik, sosial ekonomi regional tersebut serta tunduk pada peraturan tertentu.

Pembangunan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita dengan melibatkan peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat dan semua elemen yang ada dalam proses pembangunan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Arsyad (1999) bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang terjadi secara terus menerus, usaha yang dilakukan untuk menaikkan pendapatan perkapita dan berlangsung dalam jangka panjang, serta perbaikan sistem kelembagaan di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya, politik, dan hukum.

C. PERTUMBUHAN EKONOMI

Adisasmita (2013) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam rangka mencapai penambahan output yang diukur dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari suatu wilayah.

PDRB merupakan salah satu indikator dalam melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah karena PDRB menggambarkan nilai dari suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Dengan PDRB maka dapat ditentukan keberhasilan ekonomi dari suatu kegiatan ekonomi.

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun secara riil tanpa mengandung fluktuasi harga (baik inflasi maupun deflasi) sehingga dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil suatu wilayah.

1. Berdasarkan Lapangan Usaha

PDRB berdasarkan lapangan usaha, terdiri dari:

- a. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib;
- b. Konstruksi;
- c. Perdagangan Besar dan Eceran;
- d. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang;
- f. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- g. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
- h. Real Estate;
- i. Pertambangan dan Penggalian;
- j. Industri Pengolahan;
- k. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- l. Pengadaan Listrik dan Gas;
- m. Jasa Pendidikan;
- n. Transportasi dan Pergudangan;
- o. Jasa Keuangan dan Asuransi Jasa Perusahaan;
- p. Informasi dan Komunikasi;
- q. Jasa Lainnya.

2. Berdasarkan Pengeluaran

PDRB berdasarkan pengeluaran, terdiri dari:

- a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT);
- b. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Pemerintah (PK-LNPRT);
- c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP);
- d. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB);
- e. Perubahan Inventori;
- f. Ekspor Luar Negeri;

- g. Dikurangi Impor Luar Negeri;
- h. Net Ekspor Antar Daerah.

D. KONSEP BASIS EKONOMI

Economic Base Theory atau teori basis ekonomi merupakan teori yang menyatakan bahwa faktor penentu utama dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja dapat dihasilkan dari pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor (Prishardoyo, 2008).

Inti dari teori basis ekonomi ini adalah penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadi arus pendapatan dari luar daerah yang menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru (Arsyad, 1999). Hal ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor.

Ada serangkaian teori ekonomi sebagai teori yang berusaha menjalankan perubahan-perubahan wilayah yang telah teridentifikasi dengan menekankan hubungan antara sektor-sektor yang terdapat dalam perekonomian daerah. Teori yang paling sederhana dan populer adalah teori basis ekonomi (*economic base theory*). Menurut Glasson pada tahun 1990, konsep dasar basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu sektor-sektor basis dan sektor-sektor bukan basis.

E. TEORI PERUBAHAN STRUKTURAL

Secara garis besar teori perubahan struktural ini merupakan suatu transformasi perekonomian dari tradisional menjadi sektor perekonomian modern. Menurut Kristianingsih (2011), sektor perekonomian dikelompokkan sebagai berikut:

1. Sektor Primer: Sektor yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam yang ada. Seperti Pertanian, kehutanan dan perikanan, dan pertambangan dan penggalian.
2. Sektor Sekunder: Sektor yang mengolah bahan baku, baik yang berasal dari sektor primer maupun sektor sekunder itu sendiri menjadi barang lain yang lebih tinggi nilai gunanya. Seperti Industri pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Konstruksi, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, Kontruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Real Estate.
3. Sektor tersier: Sektor yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik, namun dalam bentuk jasa. Seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya.

F. INVESTASI

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi sebagai tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan produksi barang dan jasa di masa depan. Menurut Sadono Sukirno (1997) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

G. CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah jenis baru dari virus corona yang dapat menular ke manusia. Infeksi virus Covid-19 pertama kali ditemukan pada akhir Desember 2019 di Kota Wuhan, Cina. Penyebaran virus Covid-19 sangat cepat karena sifat penularannya yang sangat cepat. Hanya dalam beberapa bulan saja telah menyebar ke hamper semua negara, termasuk Indonesia (<https://www.alodokter.com>, diakses pada September 2021).

Pada tanggal 31 Desember 2019, *World Health Organization* (WHO) mendapatkan informasi mengenai kasus pneumonia yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Tanggal 7 Januari 2020, otoritas Cina mengkonfirmasi telah mengidentifikasi virus baru, yaitu virus Corona yang merupakan famili virus flu, seperti virus SARS dan MERS. Dilaporkan bahwa lebih dari 2.000 kasus infeksi virus tersebut terjadi di Cina, termasuk di luar Provinsi Hubei. Pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama virus Corona jenis baru tersebut adalah *Corona Virus Disease 2019* (disingkat menjadi COVID-19) dan pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi dunia.

Virus Corona (CoV) merupakan famili virus yang menginfeksi sistem pernapasan sehingga menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu maupun infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia (<https://www.alodokter.com>, diakses pada September 2021). Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang termasuk dalam kelompok *Coronavirus* adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Namun demikian, kecepatan penyebarannya dan tingkat keparahan gejala merupakan beberapa perbedaan dari virus Covid-19 (<https://www.alodokter.com>, diakses pada September 2021).

Masa inkubasi dapat bervariasi antar pasien, yaitu 2-14 hari setelah terpapar virus berdasarkan periode inkubasi yang ditunjukkan sebelumnya pada virus MERS. Masa inkubasi 24 hari telah diamati dalam penelitian terbaru. WHO mengatakan periode inkubasi yang panjang dapat mencerminkan paparan ganda *Coronavirus*. Menurut laporan terbaru, ada kemungkinan orang yang terinfeksi Covid-19 dapat menular sebelum menunjukkan gejala yang signifikan. Penularan dari orang ke orang diperkirakan terjadi melalui droplet ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, mirip dengan bagaimana influenza dan patogen pernapasan lainnya yang dapat terhirup ke dalam paru-paru. Penularan Covid-19 dapat juga terjadi dengan menyentuh permukaan atau objek yang memiliki virus di atasnya dan kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mungkin mata mereka sendiri.

Adapun gejala awal ketika telah terinfeksi virus Covid-19 mirip seperti gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah terinfeksi, gejala-gejala tersebut dapat hilang atau sembuh atau malah memberat.

Sedangkan gejala berat, seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas atau nyeri dada. Ketika tubuh bereaksi melawan virus corona maka keluhan tersebut akan muncul (<https://www.alodokter.com>, diakses pada September 2021).

Terdapat beberapa cara untuk mencegah penularan virus Covid-19, yaitu dengan mencuci tangan selama 20 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir sesuai dengan standar WHO, menghindari kerumunan/keramaian, menjaga posisi jarak dengan orang lain, menghindari kontak langsung dengan orang yang sakit, mengonsumsi vitamin secara rutin sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh saat sehat dan mempercepat penyembuhan saat sedang sakit, menggunakan masker saat keluar rumah, serta membersihkan dan mendisinfektasi secara berkala barang-barang yang sering disentuh.

BAB IV METODE

A. METODE PENGUMPULAN DATA

Data bersumber dari data sekunder yang diambil dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan BPS Provinsi Papua, yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015-2020. Namun dalam kajian ini, berfokus pada data tahun 2019 (tahun sebelum pandemi Covid-19) dan tahun 2020 (era pandemi Covid-19).

B. METODE ANALISIS DATA

1. *Location Quotient*

Analisis *Location Quotient* (*LQ*) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi mana saja yang termasuk sektor basis atau berpotensi ekspor dan sektor mana yang bukan merupakan sektor basis (Tarigan, 2005). Menurut Tarigan (2005), jika *LQ* menunjukkan angka lebih dari satu ($LQ > 1$) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis. Atau dapat diartikan bahwa sektor tersebut berpotensi ekspor ke daerah lain atau ke luar negeri. Kemudian, jika hasil menunjukkan angka kurang dari satu ($LQ < 1$) berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor basis, atau dengan kata lain sektor tersebut defisit dan tidak berpotensi untuk ekspor ke daerah lain atau ke luar negeri dan jika $LQ=1$ maka sektor tersebut hanya mampu mencukupi kebutuhan daerah itu sendiri. *Location Quotient* (*LQ*) dirumuskan:

$$LQ = \frac{S_{ij}/S_j}{S_{in}/S_n}$$

Dimana:

S_{ij} : PDRB pada sektor i pada wilayah analisis j

S_j : PDRB pada wilayah analisis j

S_{in} : PDB pada sektor i di wilayah referensi

S_n : PDB di wilayah referensi

Objek penelitian dalam kajian ini adalah Provinsi Papua sebagai wilayah analisis, sehingga data yang digunakan adalah data PDRB Provinsi Papua. Selain itu, data PDB Indonesia juga digunakan sebagai data wilayah referensi dalam kajian ini.

2. Model Rasio Pertumbuhan

Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dapat digunakan untuk menentukan sektor ataupun subsektor unggulan berdasarkan pertumbuhan PDRB. Masyhuri dan Zainuddin (2011) mengatakan bahwa analisis MRP menggunakan pengukuran, sebagai berikut:

- a. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RP_S) yang merupakan perbandingan antara pertumbuhan pendapatan (PDRB) sektor i di wilayah studi dengan pertumbuhan pendapatan (PDRB) sektor i di wilayah referensi, dengan rumus:

$$RP_S = \frac{(Y_{ipt} - Y_{ip0}) / Y_{ipt}}{(Y_{pt} - Y_{p0}) / Y_{p0}}$$

Keterangan:

Y_{ipt} : PDRB sektor i wilayah analisis ke p pada periode tahun akhir

Y_{ip0} : PDRB sektor i wilayah analisis ke p pada periode tahun awal

Y_{pt} : PDRB total wilayah analisis p pada periode tahun awal

Y_{p0} : PDRB total wilayah analisis p pada periode tahun awal

- b. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RP_R) yang merupakan perbandingan antara rata-rata pertumbuhan pendapatan (PDRB) sektor i di wilayah studi dengan pertumbuhan pendapatan (PDRB) sektor i di wilayah referensi, dengan rumus:

$$RP_R = \frac{(Y_{int} - Y_{in0}) / Y_{int}}{(Y_{nt} - Y_{n0}) / Y_{n0}}$$

Keterangan:

Y_{int} : PDB sektor i wilayah referensi pada periode tahun awal

Y_{in0} : PDB sektor i wilayah referensi pada periode tahun akhir

Y_{nt} : PDB wilayah referensi pada periode tahun akhir

Y_{p0} : PDB wilayah referensi pada periode tahun awal

MRP hanya memperhitungkan pertumbuhan sektor tanpa melihat kontribusi suatu sektor didalam suatu wilayah. Berikut interpretasi hasilnya:

- **Kuadran I** apabila nilai RP_R positif dan RP_S positif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama tinggi sehingga sektor tersebut merupakan potensi baik di tingkat regional maupun global (di wilayah referensinya).
- **Kuadran II** apabila nilai RP_R positif dan RP_S negatif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih rendah dari wilayah referensi sehingga sektor tersebut tidak berpotensi di tingkat regional namun secara global berpotensi.
- **Kuadran III** apabila nilai RP_R negatif dan RP_S negatif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama rendah sehingga sektor tersebut tidak berpotensi baik di tingkat regional maupun global (wilayah referensi).
- **Kuadran IV** apabila nilai RP_R negatif dan RP_S positif maka pertumbuhan sektor i di wilayah referensi lebih rendah dari wilayah analisis sehingga sektor tersebut merupakan tidak berpotensi di tingkat global namun secara regional berpotensi.

3. Metode *Overlay*

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggul, baik dari segi kontribusi maupun pertumbuhannya dengan menggabungkan hasil dari analisis LQ dan MRP (RPs). Hasil analisis ini diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe, yaitu:

- **Kuadran I** apabila RPs dan LQ memiliki nilai positif maka menunjukkan sektor ekonomi tersebut dominan, baik pertumbuhan maupun kontribusinya.
- **Kuadran II** apabila nilai RPs positif dan LQ negatif maka menunjukkan sektor ekonomi tersebut dominan dalam pertumbuhan namun kontribusinya kecil.
- **Kuadran III** apabila RPs dan LQ memiliki nilai negatif maka menunjukkan bahwa sektor ekonomi tersebut memiliki nilai kecil, baik dalam pertumbuhan maupun kontribusinya.
- **Kuadran IV** apabila nilai RPs negatif dan LQ positif maka menunjukkan bahwa sektor ekonomi tersebut memiliki pertumbuhan yang kecil namun memiliki nilai kontribusi yang besar.

4. Metode *Shift Share*

Metode *Shift Share* bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (Tarigan, 2005). Dalam analisis ini digunakan variabel pendapatan, yaitu PDRB untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua, sebagai berikut:

- a. **Regional Share (RS)** merupakan komponen *share* pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor eksternal.
- b. **Proporsional Shift (PS)** komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah tersebut dengan berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat.
- c. **Differential Shift (DS)** merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang kompetitif.
- d. **Shift Share (SS)** merupakan penjumlahan dari *Regional Share*, *Proportional Share*, dan *Differential Share*.

Adapun permodelan untuk melihat keunggulan wilayah dapat sebagai berikut:

$$RS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{Y_t}{Y_0} - 1 \right) \qquad PS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{Y_{it}}{Y_{i0}} - \frac{Y_t}{Y_0} \right)$$

$$DS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{Y_{ijt}}{Y_{i0}} - \frac{Y_{it}}{Y_{i0}} \right) \qquad SS_{ij} = RS_{ij} + PS_{ij} + DS_{ij}$$

Keterangan:

Y_t : PDB wilayah referensi periode akhir tahun

Y_0 : PDB wilayah referensi periode awal tahun

Y_{it} : PDB wilayah referensi sektor ke-i periode tahun akhir

Y_{i0} : PDB wilayah referensi sektor ke-i periode tahun awal

Y_{ijt} : PDRB wilayah analisis sektor ke-i periode tahun akhir

Y_{i0} : PDRB wilayah analisis sektor ke-i periode tahun awal

5. Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha atau komoditi unggulan di suatu daerah. Analisis Tipologi Klasen menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Klasifikasi Sektor Berdasarkan Tipologi Klasen

Kontribusi Sektor	Pertumbuhan Sektoral	
	$G_i \geq G$	$G_i < G$
$S_i \geq S$	Sektor unggulan dan tumbuh pesat	Sektor unggulan tetapi pertumbuhannya tertekan
$S_i < S$	Sektor potensial dan masih dapat dikembangkan	Bukan sektor potensial dan tertinggal

Keterangan:

G_i : Pertumbuhan sektor i di wilayah analisis

G : Pertumbuhan sektor i di wilayah referensi

S_i : Kontribusi sektor i di wilayah analisis

S : Kontribusi sektor i di wilayah referensi

6. Metode Tingkat Potensi Investasi

Tingkat Potensi Investasi (TPI) dapat diketahui dari jumlah *scoring* dari metode *Location Quotien*, *Shift Share*, Model Rasio Pertumbuhan, dan Tipologi Klassen. Semakin tinggi jumlah *scoring* maka mengindikasikan tingginya potensi investasi pada sektor tersebut, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penentuan Skor Berdasarkan Metode TPI

Score	MRP	Overlay	Klassen	Shift Share
4	RPr (+) RPs (+)	Pertumbuhan (+) Kontribusi (+)	$G_i > G; S_i > S$	DS (+) PS (+)
3	RPr (+) RPs (-)	Pertumbuhan (+) Kontribusi (-)	$G_i < G; S_i > S$	DS (+) PS (-)
2	RPr (-) RPs (+)	Pertumbuhan (-) Kontribusi (+)	$G_i > G; S_i < S$	DS (-) PS (+)
1	RPr (-) RPs (-)	Pertumbuhan (-) Kontribusi (-)	$G_i < G; S_i < S$	DS (-) PS (-)

Klasifikasi:

Score	Predikat Potensi Investasi
3,5 – 4,0	Sangat Tinggi
2,9 – 3,4	Tinggi
2,3 – 2,8	Sedang
1,7 – 2,2	Sangat Rendah
1,0 – 1,6	Sangat Rendah

BAB V PEMBAHASAN

A. KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA UNGGULAN PROVINSI PAPUA

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka terdapat 6 (enam) indikator kinerja makro pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja makro. Adapun 6 (enam) indikator tersebut, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan (rasio gini). Khusus untuk Provinsi Papua, selama era pandemi Covid-19 ini terdapat beberapa indikator mengalami dampak yang berarti.

Tabel 5.1
Indikator Makro Pembangunan Indonesia dan Provinsi Papua Tahun 2019-2020

Indikator Kinerja Makro	Indonesia				Papua			
	2019	2020	Perubahan	Dampak	2019	2020	Perubahan	Dampak
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,9	71,9	0,02	Positif	60,84	60,44	-0,4	Negatif
Angka Kemiskinan (%)	9,41	9,78	0,37	Negatif	27,53	26,64	-0,89	Positif
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,23	7,07	1,84	Negatif	3,65	4,28	0,63	Negatif
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,02	-2,07	-7,09	Negatif	-15,8	2,32	18,07	Positif
PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	40,8	39,6	-1,29	Negatif	39,81	40,07	0,26	Positif
Indeks Gini	0,38	0,385	0,005	Negatif	0,391	0,395	0,004	Negatif

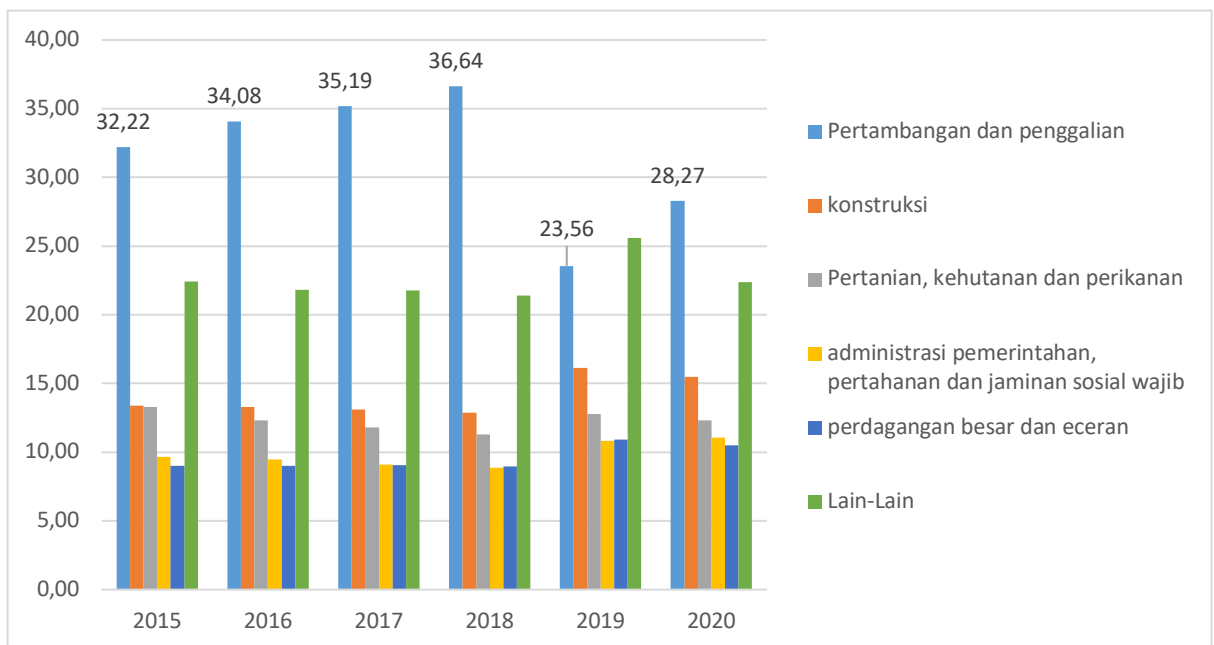
Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah.

Berdasarkan Tabel 5.1 maka dapat dilihat bahwa selama era pandemi Covid-19 ini, hampir semua indikator makro pembangunan untuk Indonesia mengalami dampak negatif dan hanya indikator IPM yang mengalami dampak positif. Sedangkan untuk Provinsi Papua, indikator yang mengalami dampak positif adalah angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta PDRB perkapita dan indikator yang mengalami dampak negatif adalah IPM, tingkat pengangguran terbuka dan rasio gini.

Ini berarti bahwa selama era pandemi Covid-19, Provinsi Papua mengalami penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi meningkat, PDRB perkapita meningkat, pengangguran meningkat, serta ketimpangan pendapatan meningkat.

Secara khusus untuk Provinsi Papua, pertumbuhan 16,62 persen pada sektor pertambangan dan penggalian sebagai kontributor terbesar perekonomian Provinsi Papua serta pertumbuhan komponen ekspor barang dan jasa sebesar 51,18 persen dari sisi pengeluaran merupakan pemicu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita. Pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah meningkat jika dibandingkan dengan pengeluaran penduduk kelompok 40 persen menengah yang mengalami penurunan merupakan salah satu pemicu terjadinya peningkatan tingkat ketimpangan pengeluaran. Pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan pengangguran di Provinsi Papua. Penurunan rata-rata pengeluaran perkapita menyebabkan terjadinya penurunan IPM (Berita resmi Statistik BPS Provinsi Papua, 2021).

Gambar 5.2
Kontribusi PDRB Provinsi Papua Tahun 2015-2020

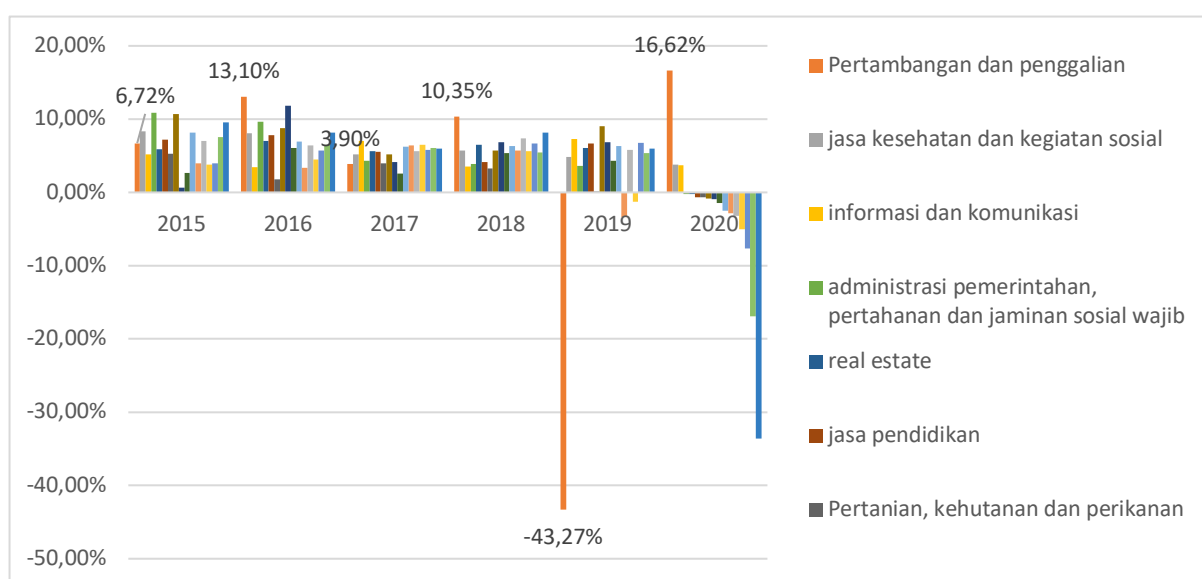


Sumber: BPS Provinsi Papua, data diolah.

Secara umum, lapangan usaha pembentuk PDRB Provinsi Papua dari tahun 2015-2020 didominasi oleh 5 (lima) lapangan usaha, yaitu pertambangan dan penggalian; konstruksi; pertanian, kehutanan dan perikanan; administrasi

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; serta perdagangan besar dan eceran. Dari kelima lapangan usaha tersebut, dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) lapangan usaha yang merupakan sektor primer, yaitu pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan, dan perikanan; ada 1 (satu) lapangan usaha yang merupakan sektor sekunder, yaitu konstruksi; dan ada 2 (dua) lapangan usaha yang merupakan sektor tersier, yaitu administrasi pemerintahan serta perdagangan besar dan eceran. Dari komposisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Papua masih didominasi oleh sektor primer dengan kontribusinya yang sebesar 40,57 persen di tahun 2020. Namun disayangkan, kedua sektor primer tersebut dari tahun 2015-2020 memiliki kecenderungan yang menurun.

Gambar 5.3
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Papua
Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, data diolah.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua juga masih didorong oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2019 atau sebelum terjadi pandemi Covid-19, lapangan usaha industri; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta pertambangan dan penggalian merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif. Penurunan paling besar terjadi di lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mencapai -43,27 persen. Disisi lain, pada tahun 2020 atau saat era pandemi Covid-19, hanya ada 3 (tiga) lapangan usaha yang mampu bertahan positif ditengah dampak pandemi Covid-19 yang

memberikan efek kontraksi yang besar, yaitu pertambangan dan penggalian, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta informasi dan komunikasi. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua masih dapat tumbuh positif pada masa pandemi Covid-19 ini.

B. ANALISIS LAPANGAN USAHA UNGGULAN

Pemetaan sektor unggulan di Provinsi Papua dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Dalam kajian ini menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ). Pendekatan tersebut dikombinasikan dengan analisis lainnya seperti Model Rasio Pertumbuhan (MRP), *Overlay*, *Shift Share*, dan Tipologi Klassen untuk mempertajam hasil analisa.

1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Dalam perhitungan LQ berdasarkan nilai lapangan usaha, PDRB Provinsi Papua sebagai wilayah studi dan nilai PDB Indonesia sebagai wilayah referensi. Tahun 2019 digunakan sebagai tahun dasar dan tahun 2020 sebagai kondisi akhir. Hal ini untuk mengamati lapangan usaha pada era pandemi Covid-19.

Tabel 5.4
Analisis LQ Provinsi Papua Tahun 2019-2020

SEKTOR	2019	2020	KET
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,93	2,81	basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,52	1,36	basis
Konstruksi	1,32	1,30	basis
Pertambangan dan Penggalian	3,77	4,31	basis
Industri Pengolahan	0,10	0,10	non basis
Informasi dan Komunikasi	0,78	0,70	non basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,40	0,37	non basis
Jasa lainnya	0,66	0,64	non basis
Jasa Pendidikan	0,78	0,73	non basis
Jasa Perusahaan	0,71	0,67	non basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,71	0,67	non basis
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	non basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,26	0,23	non basis
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,73	0,71	non basis
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,96	0,90	non basis
Real Estate	0,98	0,92	non basis
Transportasi dan Pergudangan	1,22	0,92	non basis

Sumber: Data diolah

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha yang ada, hanya beberapa lapangan usaha yang masuk dalam kategori sektor basis ($LQ > 1$). Tahun 2019, terdapat 5 (lima) lapangan usaha yang masuk kategori sektor basis, yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian; serta Transportasi dan Pergudangan. Tahun 2020, hanya terdapat 4 (empat) lapangan usaha yang masuk kategori sektor basis, yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Konstruksi; dan Pertambangan dan Penggalian.

Dapat dilihat bahwa telah terjadi perubahan lapangan usaha unggulan di tahun 2019 dan tahun 2020. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan masuk dalam kategori sektor basis di tahun 2019, namun pada era pandemi Covid-19 ini (tahun 2020) lapangan usaha tersebut memiliki tingkat spesialisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan lapangan usaha yang sama di tingkat nasional sehingga diklasifikasikan pada sektor non basis. Selain itu, tingkat spesialisasi (nilai LQ) lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan pada tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Hasil perhitungan dengan metode LQ juga menunjukkan bahwa masih kurang dari separuh lapangan usaha di Provinsi Papua yang memiliki tingkat spesialisasi lebih tinggi daripada pada tingkat nasional. Lapangan usaha yang diidentifikasi memiliki nilai diatas 1 (satu) pada tahun 2020, yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Konstruksi; dan Pertambangan dan Penggalian, memberikan gambaran bahwa keempat lapangan usaha tersebut adalah lapangan usaha unggulan di Provinsi Papua dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah sehingga pertumbuhannya dapat dipacu guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua. Dari keempat sektor unggulan tersebut, 2 (dua) diantaranya masuk dalam sektor tersier, yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

2. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis MRP digunakan pada kajian ini untuk membandingkan pertumbuhan setiap lapangan usaha pada skala Provinsi maupun skala nasional.

Tabel 5.5
Analisis MRP Provinsi Papua Tahun 2019-2020

SEKTOR	RPr	RPs	KLASIFIKASI
Pertambangan dan Penggalian	1,23	7,18	K1
Industri Pengolahan	1,85	-2,17	K2
Pengadaan Listrik dan Gas	1,48	-0,42	K2
Konstruksi	2,06	-0,37	K2
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,35	-1,07	K2
Transportasi dan Pergudangan	9,51	-14,53	K2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,46	-7,31	K2
Jasa Perusahaan	3,44	-3,29	K2
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,02	-0,08	K2
Jasa Lainnya	2,59	-1,39	K2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-3,12	-1,24	K3
Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,05	-0,63	K3
Real Estate	-1,47	-0,10	K3
Jasa Pendidikan	-1,66	-0,28	K3
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,11	-0,29	K3
Informasi dan Komunikasi	-6,69	1,61	K4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-7,33	1,65	K4

Sumber: Data diolah.

Hasil analisis dengan metode MRP menunjukkan bahwa selama periode pengamatan dari tahun 2019 sampai tahun 2020, sebagai berikut:

- Terdapat 1 (satu) lapangan usaha yang masuk dalam Kuadran I, yaitu Pertambangan dan Penggalian. Ini berarti bahwa lapangan usaha tersebut memiliki pertumbuhan yang tinggi dan merupakan potensi, baik di Provinsi maupun nasional.
- Terdapat 9 (sembilan) lapangan usaha yang masuk dalam Kuadran II, yaitu Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan

Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Lainnya. Ini berarti bahwa lapangan usaha tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol pada tingkat nasional, namun belum menonjol pada tingkat Provinsi.

- c. Terdapat 5 (lima) lapangan usaha yang masuk dalam Kuadran III, yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Jasa Keuangan dan Asuransi; *Real Estate*; Jasa Pendidikan; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Ini berarti bahwa lapangan usaha tersebut memiliki pertumbuhan yang rendah, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat nasional.
- d. Terdapat 2 (dua) lapangan usaha yang masuk dalam Kuadran IV, yaitu Informasi dan Komunikasi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Ini berarti bahwa lapangan usaha tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol di Provinsi namun pertumbuhannya belum menonjol di tingkat nasional.

Dengan demikian, lapangan usaha yang pertumbuhannya menonjol dan dapat menjadi lapangan usaha unggulan adalah Pertambangan dan Penggalian, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

3. Analisis *Overlay*

Apabila Analisis *Location Quotient* (LQ) mencoba menentukan lapangan usaha unggulan berdasarkan kontribusi lapangan usaha tersebut terhadap PDRB dan Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRT) mencoba menentukan lapangan usaha unggulan berdasarkan pertumbuhannya, maka Analisis *Overlay* merupakan penggabungan dari kedua alat analisa tadi. Analisis *Overlay* digunakan dalam kajian ini untuk menentukan lapangan usaha unggulan, baik dari sisi kontribusinya terhadap PDRB maupun dari sisi pertumbuhan lapangan usaha tersebut.

Tabel 5.6
Analisis Overlay Provinsi Papua Tahun 2019-2020

SEKTOR	MRP/RPs		LQ		KLASIFIKASI
Pertambangan dan Penggalian	7,18	+	4,31	+	K1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,65	+	1,36	+	K1
Informasi dan Komunikasi	1,61	+	0,70	-	K2
Industri Pengolahan	-2,17	-	0,10	-	K3
Pengadaan Listrik dan Gas	-0,42	-	0,04	-	K3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,24	-	0,63	-	K3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,07	-	0,71	-	K3
Transportasi dan Pergudangan	-14,53	-	0,92	-	K3
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,29	-	0,90	-	K3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,31	-	0,23	-	K3
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,63	-	0,37	-	K3
Real Estate	-0,10	-	0,92	-	K3
Jasa Perusahaan	-3,29	-	0,67	-	K3
Jasa Pendidikan	-0,28	-	0,73	-	K3
Jasa lainnya	-1,39	-	0,64	-	K3
Konstruksi	-0,37	-	1,30	+	K4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,08	-	2,81	+	K4

Sumber: Data diolah.

Hasil analisis dengan metode *Overlay* menunjukkan bahwa selama periode pengamatan dari tahun 2019 sampai tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mempunyai pertumbuhan yang tinggi dan disertai kontribusi yang tinggi pula. Hal ini juga menunjukkan bahwa lapangan usaha tersebut memiliki potensi daya saing yang tinggi karena unggul baik dari segi pertumbuhan maupun dari segi kontribusi.
- b. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi pun memiliki pertumbuhan yang unggul namun kontribusinya yang belum mendukung. Hal ini dapat dilihat dari nilai LQ dibawah 1 yang menunjukkan bukan termasuk sektor basis.
- c. Lapangan usaha Konstruksi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memiliki pertumbuhan yang kecil namun memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah.

Dengan demikian, lapangan usaha unggulan Provinsi Papua memiliki pertumbuhan yang tinggi disertai kontribusi yang tinggi pula adalah Pertambangan dan Penggalian serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

4. Analisis Shift Share

Tabel 5.7
Analisis Shift Share Provinsi Papua Tahun 2019-2020

SEKTOR	RS	PS	DS	SS	PS	Ds	KET
Pertambangan dan Penggalian	(805.570,76)	795.678,01	6.479.930,48	6.470.037,72	Tumbuh Cepat	Daya Saing Tinggi	K1
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(343.711,99)	780.362,18	(548.497,16)	(111.846,96)	Tumbuh Cepat	Daya Saing Rendah	K4
Real Estate	(82.256,23)	543.155,98	(470.145,78)	(9.246,03)	Tumbuh Cepat	Daya Saing Rendah	K4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	(283.865,33)	524.207,03	(266.135,35)	(25.793,65)	Tumbuh Cepat	Daya Saing Rendah	K4
Jasa Keuangan dan Asuransi	(47.056,15)	159.267,54	(145.531,63)	(33.320,24)	Tumbuh Cepat	Daya Saing Rendah	K4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(23.047,81)	48.906,64	(214.377,06)	(188.518,23)	Tumbuh Cepat	Daya Saing Rendah	K4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(1.678,73)	10.263,80	(10.919,16)	(2.334,09)	Tumbuh Cepat	Daya Saing Rendah	K4
Industri Pengolahan	(62.301,69)	3.561,48	(92.233,34)	(150.973,55)	Tumbuh Cepat	Daya Saing Rendah	K4
Pengadaan Listrik dan Gas	(1.148,28)	2.950,09	(2.336,49)	(534,69)	Tumbuh Cepat	Daya Saing Rendah	K4
Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	(51.577,20)	(6.800,29)	153.584,85	95.207,36	Tumbuh Lambat	Daya Saing Tinggi	K2
Jasa lainnya	(36.116,97)	(20.705,45)	755,79	(56.066,62)	Tumbuh Lambat	Daya Saing Tinggi	K2
Informasi dan Komunikasi	(121.844,15)	(50.765,66)	391.848,58	219.238,77	Tumbuh Lambat	Daya Saing Tinggi	K2
Jasa Pendidikan	(70.495,45)	(56.195,89)	104.856,53	(21.834,81)	Tumbuh Lambat	Daya Saing Tinggi	K2
Transportasi & Pergudangan	(149.660,15)	(146.735,94)	(2.135.823,22)	(2.432.219,31)	Tumbuh Lambat	Daya Saing Rendah	K3
Jasa Perusahaan	(39.077,36)	(244.977,78)	140.157,87	(143.897,27)	Tumbuh Lambat	Daya Saing Tinggi	K3
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	(278.629,70)	(454.281,62)	398.705,11	(334.206,20)	Tumbuh Lambat	Daya Saing Tinggi	K3
Konstruksi	(386.786,13)	(1.522.985,79)	1.751.411,45	(158.360,47)	Tumbuh Lambat	Daya Saing Tinggi	K3

Sumber: Data diolah.

Berdasarkan perhitungan *Regional Share* (RS) dapat diketahui bahwa nilai total RS adalah Rp - 2.784.824,08. Ini berarti bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2020, pengaruh pertumbuhan nasional memberikan nilai tambah sebesar Rp - 2.784.824,08 terhadap perekonomian Provinsi Papua. Dengan demikian, kinerja atau produktivitas perekonomian Provinsi Papua pada era pandemi Covid-19 tidak banyak ditopang oleh perekonomian pada tingkat nasional. Selain itu, hampir seluruh lapangan usaha memiliki nilai RS Negatif sehingga dapat diartikan bahwa lapangan usaha di Provinsi Papua tidak banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dari nasional pada era pandemi Covid-19 ini.

Dari perhitungan *Proportional Shift* (PS) diketahui bahwa terdapat 9 (sembilan) lapangan usaha yang memiliki nilai PS positif ($PS > 0$), yaitu Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Keuangan dan Asuransi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Industri Pengolahan; dan Pengadaan Listrik dan Gas. Ini berarti bahwa lapangan usaha tersebut memiliki tingkat spesialisasi yang lebih tinggi di Provinsi Papua dibandingkan di tingkat nasional dan dapat termasuk dalam kategori unggul karena memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat.

Dari perhitungan *Differential Shift* (DS) diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) lapangan usaha yang memiliki notasi positif ($DS > 0$). Lapangan usaha tersebut, yaitu Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; dan Jasa lainnya. Hasil *Differential Shift* yang positif mengindikasikan bahwa lapangan usaha tersebut memiliki tingkat daya saing yang lebih tinggi di Provinsi Papua dibandingkan dengan lapangan usaha yang sama pada tingkat Nasional dan termasuk dalam kategori unggulan karena memiliki daya saing yang tinggi.

Hasil dari perhitungan *Proportional Shift* (PS) dan *Differential Shift* (DS) dapat dipetakan menjadi 4 (empat) kuadran yang mencerminkan tingkat pertumbuhan dan daya saing dari tiap lapangan usaha. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan cepat serta daya saing tinggi dikategorikan dalam Kuadran I, yaitu

Pertambangan dan Penggalian. Ini berarti bahwa lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian merupakan lapangan usaha unggulan di Provinsi Papua menurut analisis *Shift Share* sehingga dapat menjadi prioritas dalam kegiatan perencanaannya.

5. Analisis Tipologi Klassen

Tabel 5.8
Analisis Tipologi Klassen Provinsi Papua Tahun 2019-2020

Sektor	Rata-Rata Prov. Papua		Rata-Rata Indonesia		RPs & RPr	SPs & SPr	Kuaran
	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi			
Pengadaan Listrik & Gas	4,33%	1,87%	0,85%	1,06%	Pertumbuhan Cepat	Sektor Maju	K1
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	4,10%	13,67%	-2,21%	3,04%	Pertumbuhan Cepat	Sektor Maju	K1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	1,41%	1,66%	5,88%	0,09%	Pertumbuhan Lambat	Sektor Maju	K2
Jasa Perusahaan	1,93%	9,77%	2,40%	1,93%	Pertumbuhan Lambat	Sektor Maju	K2
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	-13,32%	30,95%	2,31%	3,51%	Pertumbuhan Lambat	Sektor Maju	K2
Jasa Pendidikan	-0,32%	12,16%	4,46%	3,32%	Pertumbuhan Lambat	Sektor Maju	K2
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,93%	2,92%	10,15%	1,30%	Pertumbuhan Lambat	Sektor Maju	K2
Jasa lainnya	-13,84%	4,43%	3,24%	1,93%	Pertumbuhan Lambat	Sektor Maju	K2
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	1,74%	10,07%	2,68%	13,12%	Pertumbuhan Lambat	Sektor Potensial	K3
Pertambangan & Penggalian	-3,13%	2,16%	-0,37%	7,66%	Pertumbuhan Lambat	Sektor Potensial	K3
Informasi & Komunikasi	-3,12%	0,06%	10,00%	5,96%	Pertumbuhan Lambat	Sektor Potensial	K3
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,95%	0,04%	4,93%	4,32%	Pertumbuhan Lambat	Sektor Potensial	K3
Real Estate	-5,77%	0,75%	4,04%	3,08%	Pertumbuhan Lambat	Sektor Potensial	K3
Industri Pengolahan	5,52%	4,41%	0,43%	21,54%	Pertumbuhan Cepat	Sektor Potensial	K4
Konstruksi	1,28%	1,26%	1,25%	10,47%	Pertumbuhan Cepat	Sektor Potensial	K4
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	3,02%	2,49%	0,44%	13,57%	Pertumbuhan Cepat	Sektor Potensial	K4
Transportasi & Pergudangan	-0,44%	1,34%	-4,33%	4,11%	Pertumbuhan Cepat	Sektor Potensial	K4

Sumber: Data diolah.

Gambar 5.1
Pemetaan Kuadran menurut Tipologi Klassen

<p align="center">Kuadran II <i>(Stagnan Sector)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2. Jasa Perusahaan 3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4. Jasa Pendidikan 5. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6. Jasa lainnya 	<p align="center">Kuadran I <i>(Developed Sector)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
<p align="center">Kuadran III <i>(Underdeveloped Sector)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Informasi dan Komunikasi 4. Jasa Keuangan dan Asuransi 5. Real Estate 	<p align="center">Kuadran IV <i>(Developing Sector)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan 2. Konstruksi 3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4. Transportasi dan Pergudangan

Sumber: Data diolah.

Hasil perhitungan Tipologi Klassen menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) lapangan usaha yang memiliki tingkat pertumbuhan dan kontribusi lebih besar daripada nasional sehingga masuk dalam Kuadran I, yaitu Pengadaan Listrik dan Gas serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Ini berarti bahwa lapangan usaha tersebut merupakan lapangan usaha yang maju dan tumbuh dengan cepat (*developed sector*). Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian tidak masuk dalam Kuadran I dikarenakan tahun 2019 mengalami pertumbuhan negatif yang besar sehingga lebih rendah dari nasional.

6. Klasifikasi Potensi Investasi Provinsi Papua

Analisis potensi investasi digunakan untuk mengetahui potensi investasi pada lapangan usaha di Provinsi Papua. Analisis potensi investasi merupakan kombinasi dari hasil perhitungan analisa *Location Quotient* (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), *Overlay*, *Shift Share* dan Tipologi Klassen.

Tabel 5.9
Hasil Perhitungan Potensi Investasi

Sektor	Posisi Kuadran				Score				Rata-rata Skor	Ket
	MRP	Overlay	SS	TK	MRP	Overlay	SS	TK		
Pertambangan dan Penggalian	K1	K1	K1	K3	4	4	4	1	3,25	Tinggi
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	K4	K1	K2	K2	2	4	3	3	3,00	Tinggi
Pengadaan Listrik dan Gas	K2	K3	K4	K1	3	1	2	4	2,50	Sedang
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	K2	K3	K4	K1	3	1	2	4	2,50	Sedang
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	K2	K4	K4	K2	3	2	2	3	2,50	Sedang
Jasa lainnya	K2	K3	K2	K2	3	1	3	3	2,50	Sedang
Informasi dan Komunikasi	K4	K2	K2	K3	2	3	3	1	2,25	Rendah
Industri Pengolahan	K2	K3	K4	K4	3	1	2	2	2,00	Rendah
Konstruksi	K2	K4	K3	K4	3	2	1	2	2,00	Rendah
Jasa Perusahaan	K2	K3	K3	K2	3	1	1	3	2,00	Rendah
Jasa Pendidikan	K3	K3	K2	K2	1	1	3	3	2,00	Rendah
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	K3	K3	K4	K2	1	1	2	3	1,75	Rendah
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	K2	K3	K3	K4	3	1	1	2	1,75	Rendah
Transportasi dan Pergudangan	K2	K3	K3	K4	3	1	1	2	1,75	Rendah
Jasa Keuangan dan Asuransi	K3	K3	K4	K3	1	1	2	1	1,25	Sangat Rendah
Real Estate	K3	K3	K4	K3	1	1	2	1	1,25	Sangat Rendah
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	K3	K3	K4	K3	1	1	2	1	1,25	Sangat Rendah

Sumber: Data diolah.

Dari hasil perhitungan potensi investasi pada era pandemi Covid-19 (tahun 2019-2020) dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) lapangan usaha di Provinsi Papua memiliki potensi tinggi yaitu Pertambangan & Penggalian; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian masuk dalam kategori potensi investasi yang tinggi dikarenakan memiliki tingkat pertumbuhan yang baik, kontribusi yang besar dan memiliki daya saing pada tingkat nasional sehingga dapat dikatakan lapangan usaha tersebut memiliki potensi investasi yang tinggi. Sebenarnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dapat menjadi potensi investasi yang sangat tinggi, namun dikarenakan pada tahun 2019

mengalami kontraksi pertumbuhan yang besar sehingga pada analisis Tipologi Klasen Kuadran hanya masuk di Kuadran III. Sementara itu, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial masuk dalam potensi tinggi di era pandemi Covid-19 ini dimungkinkan karena lapangan usaha tersebut menjadi sektor penggerak sebagai akibat dari kebutuhan akan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sangat tinggi.

Terdapat 3 (tiga) lapangan usaha yang memiliki klasifikasi potensi investasi sangat rendah. Lapangan usaha yang memiliki potensi investasi sangat rendah, yaitu Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini dibuktikan dari serangkaian alat analisis yang digunakan dalam kajian ini menunjukkan tingkat pertumbuhan, kontribusi dan daya saing yang rendah jika dibandingkan dengan tingkat nasional.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai uraian sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan terkait pemetaan lapangan usaha unggulan dan potensi investasi di Provinsi Papua pada era pandemi Covid-19, sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020, terdapat 4 (empat) lapangan usaha yang masuk dalam kategori basis atau unggul dari segi kontribusi, yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Konstruksi; serta Pertambangan dan Penggalian. Terjadi pergeseran lapangan usaha kategori basis pada tahun 2019 dan tahun 2020. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan masuk dalam kategori basis pada tahun 2019, namun tidak lagi masuk dalam kategori basis pada tahun 2020.
2. Terdapat 3 (tiga) lapangan usaha yang masuk dalam kategori unggul ditinjau dari tingkat pertumbuhannya selama masa pengamatan (tahun 2019-2020), yaitu Pertambangan dan Penggalian; Informasi dan Komunikasi; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
3. Lapangan usaha yang unggul dari sisi kontribusi maupun sisi pertumbuhan di Provinsi Papua selama masa pengamatan (tahun 2019-2020), yaitu Pertambangan dan Penggalian serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
4. Lapangan usaha yang unggul dari sisi daya saing adalah Penggalian dan Pertambangan. Ini berarti bahwa lapangan usaha tersebut memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang tinggi.
5. Lapangan usaha yang memiliki tingkat pengembangan tinggi (*Developed Sector*) karena merupakan lapangan usaha yang maju dan tumbuh dengan cepat, yaitu Pengadaan Listrik dan Gas serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Lapangan usaha tersebut memiliki tingkat pertumbuhan dan kontribusi yang lebih besar di Provinsi Papua daripada tingkat nasional.
6. Lapangan usaha yang memiliki klasifikasi tingkat potensi investasi tinggi pada era pandemi Covid-19 (tahun 2019-2020), yaitu Pertambangan dan Penggalian

serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal ini dikarenakan lapangan usaha tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang baik, kontribusi yang besar, dan memiliki daya saing pada tingkat nasional.

B. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis dari kajian ini, sebagai berikut:

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan lapangan usaha unggulan berdaya saing tinggi yang terindikasi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan, keadilan dan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Papua.
2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi lapangan usaha yang unggul dan berdaya saing dengan menerapkan pengembangan teknologi tepat guna yang terbarukan dan ramah lingkungan.
3. Mendorong investasi lapangan usaha di sektor non basis untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produksi yang mampu memenuhi kebutuhan Provinsi Papua sehingga mampu menjadi lapangan usaha unggulan.
4. Modernisasi infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Pengadaan Listrik dan Gas; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Real Estate; dan Transportasi dan Pergudangan sehingga dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan *output* sehingga dapat meningkatkan daya saing lapangan usaha.
5. Standardisasi kualitas produk dan sumberdaya manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor guna meningkatkan produk dan SDM dalam persiapan era persaingan bebas yang syarat dengan standarisasi.

-
6. Mengarahkan investasi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal ini untuk melakukan spesialisasi dan akselerasi investasi dikarenakan lapangan usaha ini sebagai lapangan usaha dengan pertumbuhan dan kontribusinya dominan, serta perkembangan lapangan usahanya maju dengan pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alodokter. 2021. *Virus Corona*. Diperoleh dari <https://www.alodokter.com>
- Apridar, dkk. (2019). *Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2020*. Diperoleh dari <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020*. Diperoleh dari <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2021). *Provinsi Papua Dalam Angka 2021*. Jayapura: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2021, Februari 5). *Pertumbuhan Ekonomi Papua Triwulan IV-2020. Berita Resmi Statistik No. 12/02/94/Th. XIV*. Diperoleh dari <https://papua.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2021, Februari 15). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Papua September 2020. Berita Resmi Statistik No. 15/02/94/Th. V*. Diperoleh dari <https://papua.bps.go.id>
- Bank Indonesia. (4 Januari 2021). *Inflasi 2020 Rendah (Berita Terkini/Siaran Pers)*. Diperoleh dari <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (1 Maret 2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Papua Februari 2021*. Diperoleh dari <https://www.bi.go.id>
- Glasson, J. (1990). *Pengantar Perencanaan Regional (Penerjemah P. Sitohang)*. Jakarta: FEUI.
- Hardiansyah, R, dkk. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Kepulauan Riau*.
- Kementerian Tenaga Kerja. (1 April 2021). *Ketenagakerjaan Dalam Data Edisi 3 2021*. Diperoleh dari <https://satudata.kemnaker.go.id>
- Kristianingsih (2011). Analisis Struktur Ekonomi Kota Bandung dengan Menggunakan Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Location Quotient (LQ) dan Shift and Share Tahun 2007-2010 . *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi Vol 3, No. 2*, 209-226.
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

-
- Oeliestina. (2021). Analisis Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Uji Statistik Mc Nemar. *Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.16. No.3, Juli – September 2021*, 503-516.
- Prishardoyo, B. (2008). Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005. *Jurnal Jejak Vol.1 No.1, September 2008*, 1-9.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Sukirno, S. (1997). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Riyagra Tindo Persada.
- Sutrisno. (2019). Covid 19 dan Arah Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi 53(9)*, 1689-1699.
- Tambunan, T. (2001). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarigan, R. (2004). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. P. (1999). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Empat Jilid Kedua*. Jakarta: Penerbit Erlangga.